BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan landasan ilmiah yang memberikan dasar konseptual bagi penelitian melalui pengkajian teori, konsep, kebijakan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini menjadi acuan dalam memahami permasalahan penelitian, menyusun kerangka berpikir, serta menganalisis hasil penelitian secara sistematis.

Dalam penelitian ini, kajian pustaka mencakup landasan teoretis, landasan sistem nilai, landasan kebijakan dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh kajian tersebut disusun untuk memperkuat dasar konseptual penelitian, mengidentifikasi *research gap*, serta menjadi acuan dalam menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid di sekolah dasar.

A. Landasan Teoretis

Landasan Teoretis merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis fokus penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan. Pada penelitian ini, landasan Teoretis disusun sebagai pijakan untuk memahami manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid di sekolah dasar. Teori-teori yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan dasar yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara lingkungan belajar, pengelolaan program perpustakaan, serta pengembangan literasi membaca murid.

1. Teori Ekologi Perkembangan

Perkembangan murid merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap sejak individu dilahirkan hingga mencapai tingkat kematangan tertentu. Proses tersebut tidak hanya ditandai oleh pertambahan

usia atau perubahan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan kemampuan berpikir, berbahasa, bersosialisasi, mengelola emosi, serta membentuk perilaku sebagai hasil interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Dengan demikian, perkembangan tidak dapat dipahami sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil hubungan timbal balik antara karakteristik individu dengan berbagai pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku Psikologi Perkembangan (Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak) dijelaskan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif pada fungsi-fungsi individu yang berlangsung secara bertahap menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi. Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil interaksi antara pertumbuhan, proses belajar dan lingkungan, sehingga perkembangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya (Abubakar & Ngalimun, 2019: 4–6).

Pandangan mengenai pentingnya lingkungan dalam perkembangan individu kemudian dijelaskan secara lebih komprehensif oleh Urie Bronfenbrenner melalui *Ecological Systems Theory*. Dalam karyanya yang berjudul *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia harus dipahami dalam konteks hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan tempat ia hidup. Menurutnya, setiap individu berkembang di dalam suatu sistem ekologi yang tersusun atas berbagai lapisan lingkungan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, kualitas perkembangan individu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik pribadi yang dimilikinya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat berlangsungnya interaksi sehari-hari (Bronfenbrenner, 1979: 3–21).

Seiring berkembangnya kajian mengenai perkembangan manusia, Bronfenbrenner bersama Pamela A. Morris menyempurnakan teori tersebut melalui *Bioecological Theory of Human Development*. Dalam

pengembangan ini diperkenalkan model *Process–Person–Context–Time* (PPCT) yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu proses (*process*), karakteristik individu (*person*), lingkungan (*context*) dan waktu (*time*). Di antara keempat komponen tersebut, proximal process dipandang sebagai mekanisme utama yang mendorong perkembangan individu melalui interaksi yang berlangsung secara rutin, berulang dan bermakna antara individu dengan orang lain, objek, maupun simbol yang berada di lingkungan sekitarnya (Bronfenbrenner & Morris, 2006: 795–806; 822–825).

Perkembangan teori Bronfenbrenner selanjutnya mendapat perhatian dari Jonathan Tudge beserta koleganya yang menilai bahwa banyak penelitian pendidikan masih menggunakan teori ekologi secara sederhana dengan hanya menjelaskan lima sistem lingkungan, tanpa memperhatikan perkembangan teorinya menuju model bioekologi. Menurut Tudge dkk., pemahaman yang utuh terhadap teori Bronfenbrenner harus memperhatikan keterkaitan antara individu, proses interaksi, konteks lingkungan dan dimensi waktu sebagaimana dirumuskan dalam model PPCT. Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam penelitian pendidikan sebaiknya tidak berhenti pada pemetaan lingkungan yang memengaruhi murid, tetapi juga menjelaskan bagaimana interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam lingkungan tersebut membentuk proses perkembangan individu (Tudge et al., 2009: 198–204).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan murid merupakan hasil interaksi yang kompleks antara individu dengan lingkungan yang mengitarinya. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kebijakan pendidikan tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berhubungan dalam membentuk pengalaman belajar murid. Oleh karena itu, teori ekologi perkembangan dipandang relevan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa keberhasilan program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan perpustakaan

itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai sistem lingkungan yang mendukung proses belajar murid secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan literasi membaca murid dipengaruhi oleh interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara individu dengan berbagai lingkungan belajar. Untuk menjelaskan hubungan tersebut secara lebih sistematis, Bronfenbrenner mengelompokkan lingkungan perkembangan individu ke dalam lima sistem yang saling berkaitan.

Menurut Bronfenbrenner (1979: 22–27), sistem ekologi perkembangan terdiri atas *microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem* dan *chronosystem*. Kelima sistem tersebut membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan dalam memengaruhi perkembangan individu. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, ruang lingkup, serta tingkat pengaruh yang berbeda, tetapi bekerja secara terpadu dalam membentuk pengalaman belajar, perkembangan kognitif, sosial, emosional, maupun kemampuan literasi murid. Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap sistem lingkungan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap keberhasilan manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid. Adapun kelima sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) *Microsystem*

Menurut Bronfenbrenner, *microsystem* merupakan lingkungan yang memiliki hubungan paling dekat dengan individu karena di dalamnya terjadi interaksi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan tersebut meliputi keluarga, sekolah, guru, teman sebaya, serta berbagai aktivitas yang secara rutin dialami individu. Interaksi yang terjadi pada lingkungan ini bersifat timbal balik (*bidirectional*), sehingga individu tidak hanya menerima pengaruh dari lingkungannya, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan tersebut melalui perilaku, respons dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, *microsystem* menjadi sistem yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi sehingga

memberikan pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan individu (Bronfenbrenner, 1979: 22–26).

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Bronfenbrenner dan Morris melalui *Bioecological Theory of Human Development*. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan individu terutama ditentukan oleh *proximal process*, yaitu interaksi yang berlangsung secara rutin, berulang, aktif dan bermakna antara individu dengan orang lain, objek, maupun simbol yang berada di lingkungan terdekatnya. Semakin berkualitas interaksi tersebut, semakin besar peluang berkembangnya kemampuan kognitif, sosial, emosional, maupun bahasa individu (Bronfenbrenner & Morris, 2006: 795–806).

Sekolah merupakan salah satu unsur utama *microsystem* karena menjadi lingkungan yang paling sering berinteraksi dengan murid setelah keluarga dalam konteks pendidikan. Guru, teman sebaya, ruang kelas, perpustakaan sekolah, serta berbagai kegiatan pembelajaran membentuk pengalaman belajar yang secara langsung memengaruhi perkembangan kemampuan membaca, berpikir dan belajar murid. Oleh karena itu, kualitas interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perkembangan literasi membaca.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa program perpustakaan sekolah merupakan bagian dari *microsystem* karena menjadi lingkungan belajar yang mempertemukan murid dengan guru, pengelola perpustakaan, koleksi bacaan, media digital, serta berbagai kegiatan literasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas manajemen program perpustakaan akan sangat menentukan kualitas interaksi yang terbentuk antara murid dengan lingkungan belajarnya. Semakin baik pengelolaan program perpustakaan, semakin besar peluang terbentuknya kebiasaan membaca dan meningkatnya literasi membaca murid.

b) *Mesosystem*

Bronfenbrenner (1979: 25–26) menjelaskan bahwa *mesosystem* merupakan hubungan atau interaksi yang terjadi antarberbagai *microsystem* yang dimiliki individu. *Mesosystem* tidak berfokus pada satu lingkungan tertentu, tetapi pada keterkaitan antara lingkungan-lingkungan yang sama-sama berinteraksi secara langsung dengan individu. Hubungan antara keluarga dengan sekolah, guru dengan orang tua, maupun sekolah dengan masyarakat merupakan contoh hubungan yang membentuk *mesosystem*.

Mesosystem tercermin melalui kolaborasi antara kepala sekolah, guru, pengelola perpustakaan, orang tua, serta berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan belajar murid. Hubungan yang harmonis antarberbagai pihak tersebut memungkinkan terciptanya kesinambungan antara pembiasaan membaca di sekolah dan di rumah sehingga budaya literasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebaliknya, hubungan yang kurang efektif berpotensi menghambat pelaksanaan program literasi di sekolah.

c) *Exosystem*

Berbeda dengan *microsystem* dan *mesosystem* yang melibatkan interaksi langsung dengan individu, Bronfenbrenner (1979: 25–26) menjelaskan bahwa *exosystem* merupakan lingkungan yang tidak berhubungan secara langsung dengan individu, tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap proses perkembangannya. Lingkungan tersebut meliputi kebijakan organisasi, lingkungan kerja orang tua, lembaga pemerintah, media massa, maupun berbagai keputusan yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan individu.

d) *Macrosystem*

Berbeda dengan tiga sistem sebelumnya, *macrosystem* lebih menekankan pada lingkungan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan individu, menggambarkan lingkungan yang lebih luas berupa nilai, norma, budaya, ideologi, serta kebijakan

yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Bronfenbrenner (1979), *macrosystem* menjadi landasan yang memengaruhi bagaimana sistem-sistem di bawahnya bekerja, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, budaya, politik, maupun kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian, perkembangan individu tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan kebijakan yang berlaku pada suatu negara maupun daerah.

Dalam perspektif bioekologi, Bronfenbrenner dan Morris (2006) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang berkembang pada tingkat *macrosystem* akan memengaruhi arah kebijakan pendidikan, sistem pembelajaran, serta lingkungan belajar yang dialami murid. Oleh karena itu, perubahan paradigma pendidikan pada tingkat nasional maupun daerah akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk dalam pengelolaan program literasi dan perpustakaan sekolah.

Macrosystem tercermin melalui berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar sehingga murid mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual dan berpusat pada murid. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mengintegrasikan pendekatan *Deep Learning* sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Selain kebijakan nasional, lingkungan *macrosystem* pada penelitian ini juga tercermin melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mendukung penguatan budaya literasi di sekolah dasar. Implementasi 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa melalui tema Salasa Mapag Buana serta keberadaan Komunitas Literasi Sekolah Purbasari (Purwakarta Membaca Setiap Hari) menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya membaca melalui pembiasaan literasi di sekolah. Berbagai kebijakan tersebut menjadi lingkungan makro yang memberikan arah sekaligus dukungan terhadap penyelenggaraan program perpustakaan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa keberhasilan manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal sekolah, tetapi juga oleh sistem nilai dan kebijakan yang berkembang pada tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, *macrosystem* menjadi landasan yang membentuk arah pengembangan budaya literasi, penyelenggaraan program perpustakaan, serta implementasi berbagai inovasi pembelajaran yang mendukung peningkatan literasi membaca murid.

e) *Chronosystem*

Sistem terakhir dalam Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner adalah *chronosystem*, yaitu dimensi waktu yang menjelaskan bahwa perkembangan individu berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang terjadi sepanjang rentang kehidupannya maupun perubahan yang berlangsung dalam lingkungan sosial. Menurut Bronfenbrenner (1979: 26–27), perubahan tersebut dapat berupa perubahan kondisi keluarga, perkembangan teknologi, perubahan budaya, maupun perubahan kebijakan yang secara bertahap membentuk pengalaman dan proses perkembangan individu.

Bronfenbrenner dan Morris (2006: 795–806) mempertegas pandangan tersebut melalui model *Process–Person–Context–Time*

(PPCT) yang menempatkan dimensi waktu (*time*) sebagai salah satu unsur penting dalam proses perkembangan. Menurut mereka, individu akan terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga perkembangan tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat.

Chronosystem tampak melalui berbagai transformasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara murid memperoleh informasi, tidak lagi terbatas pada buku cetak, tetapi juga melalui berbagai sumber digital. Perubahan tersebut mendorong sekolah untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan perpustakaan digital, media pembelajaran berbasis teknologi, serta berbagai sumber belajar elektronik yang mampu memperluas akses murid terhadap bahan bacaan dan informasi.

Perubahan kebijakan pendidikan juga menjadi bagian dari chronosystem. Implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan pendekatan *Deep Learning*, serta meningkatnya tuntutan terhadap keterampilan abad ke-21 menunjukkan bahwa proses pembelajaran terus mengalami transformasi. Perubahan tersebut menuntut sekolah untuk melakukan inovasi dalam mengelola program perpustakaan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi berkembang menjadi pusat sumber belajar yang mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif dan berpusat pada murid. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah tidak lagi hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi berkembang sebagai pusat sumber belajar yang mampu mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Chronosystem dipahami sebagai berbagai perubahan yang mendorong pengelolaan perpustakaan sekolah untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman pada penelitian ini. Transformasi

teknologi, digitalisasi layanan perpustakaan, perubahan kurikulum, serta meningkatnya kebutuhan literasi informasi menjadi faktor yang memperkuat pentingnya inovasi dalam manajemen program perpustakaan agar tetap relevan dengan kebutuhan belajar murid pada era saat ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai Teori Ekologi Perkembangan, dapat dipahami bahwa perkembangan literasi membaca murid merupakan hasil interaksi yang berlangsung secara dinamis antara individu dengan berbagai sistem lingkungan yang saling berkaitan. Lingkungan yang paling dekat dengan murid (*microsystem*), hubungan antarlingkungan (*mesosystem*), dukungan kebijakan dan kelembagaan (*exosystem*), nilai serta kebijakan pendidikan (*macrosystem*), hingga perubahan sosial dan perkembangan teknologi (*chronosystem*) merupakan satu kesatuan yang membentuk ekosistem pendidikan. Dengan demikian, peningkatan literasi membaca merupakan hasil interaksi berbagai sistem lingkungan yang saling mendukung dan tidak dapat dibebankan hanya kepada murid maupun guru, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan.

Perpustakaan sekolah diposisikan sebagai salah satu komponen penting dalam *microsystem* dalam penelitian ini karena menjadi lingkungan belajar yang berinteraksi secara langsung dengan murid melalui berbagai program literasi membaca. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan program perpustakaan juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara kepala sekolah, guru, pustakawan, orang tua, pemerintah, serta berbagai kebijakan pendidikan yang menjadi bagian dari sistem lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, Teori Ekologi Perkembangan dipilih sebagai grand theory karena mampu menjelaskan bahwa keberhasilan program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid merupakan hasil interaksi berbagai sistem lingkungan yang saling memengaruhi.

Meskipun demikian, Teori Ekologi Perkembangan lebih menitikberatkan pada hubungan antara individu dengan berbagai sistem

lingkungan yang memengaruhi proses perkembangan. Teori ini belum secara khusus menjelaskan bagaimana lingkungan pendidikan dikelola melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen agar mampu mendukung perkembangan literasi membaca secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Manajemen George R. Terry sebagai *middle theory* untuk menjelaskan proses pengelolaan program perpustakaan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating dan controlling* (pengendalian). Melalui teori tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana program perpustakaan sekolah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan sebagai upaya meningkatkan literasi membaca murid.

2. Teori Manajemen George R. Terry

Manajemen merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Melalui manajemen yang baik, seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dapat direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, serta dikendalikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh sumber daya tersebut secara sistematis, efisien dan berkelanjutan.

Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan menjadi landasan penting dalam mengembangkan berbagai program sekolah, termasuk pengelolaan program perpustakaan sekolah. Program perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan koleksi buku, tetapi juga mencakup proses perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, serta pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, keberhasilan program perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraannya.

Secara umum, manajemen dipahami sebagai proses mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organizing),* pelaksanaan atau penggerakan *(actuating) dan* evaluasi *(controlling)* yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (dalam Sukarna, 2011: 3). Definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju pencapaian tujuan secara efektif.

Pandangan George R. Terry tersebut sejalan dengan pendapat Husaini Usman yang menyatakan bahwa manajemen merupakan ilmu sekaligus proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan berbagai sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya tersebut secara sistematis dan berkesinambungan.

Fungsi-fungsi manajemen dalam dunia Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis karena tujuan utamanya bukan memperoleh keuntungan, melainkan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada murid. Oleh karena itu, seluruh program sekolah, termasuk program perpustakaan sekolah, memerlukan pengelolaan yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Pengelolaan tersebut mencakup penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan murid, pengorganisasian tenaga pengelola, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, hingga pengendalian terhadap pelaksanaan program agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis dalam mengelola berbagai sumber daya organisasi melalui fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan suatu program. Teori manajemen George R. Terry digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang sesuai untuk mengkaji bagaimana program perpustakaan sekolah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan dalam upaya meningkatkan literasi membaca murid di sekolah dasar.

Menurut George R. Terry, fungsi manajemen terdiri atas empat fungsi utama yang dikenal dengan istilah *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC). Keempat fungsi tersebut merupakan suatu siklus manajemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap fungsi memiliki karakteristik serta peran yang berbeda, namun seluruhnya saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap fungsi manajemen menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah pada penelitian ini.

a) Perencanaan (*Plannimg)*

Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi pertama dalam proses manajemen sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berikutnya. George R. Terry menjelaskan bahwa *planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results*. Dengan kata lain, perencanaan merupakan proses memilih serta menghubungkan berbagai fakta, menyusun asumsi mengenai kondisi yang akan datang, kemudian merumuskan berbagai kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi (George R. Terry dalam Sukarna, 2011:10).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan bukan sekadar menyusun daftar kegiatan, tetapi merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebutuhan organisasi serta kondisi yang

dihadapi. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi memanfaatkan sumber daya secara efektif, mengurangi ketidakpastian, serta meminimalkan berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan program akan berlangsung tanpa arah yang jelas sehingga tujuan organisasi sulit dicapai.

Fungsi perencanaan dalam pendidikan diwujudkan melalui penyusunan berbagai program sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan murid serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan program kerja, penetapan sasaran, penyediaan sumber daya manusia, pengalokasian anggaran, hingga penentuan indikator keberhasilan program. Melalui proses tersebut, sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan setiap kegiatan pendidikan secara efektif dan terarah.

Pada pengelolaan program perpustakaan sekolah, fungsi perencanaan mencakup penyusunan program kerja perpustakaan, pengadaan koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan murid, penyusunan program literasi membaca, pengembangan layanan perpustakaan, penyediaan media digital sebagai sumber belajar, serta integrasi kegiatan literasi ke dalam proses pembelajaran. Seluruh komponen tersebut perlu direncanakan secara sistematis agar program perpustakaan mampu mendukung peningkatan literasi membaca murid secara optimal.

Fungsi *planning* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana SDN Pasawahan Kidul dan SDN Cihuni menyusun program perpustakaan berdasarkan kebutuhan murid, menetapkan tujuan program, merencanakan pengadaan koleksi, mengalokasikan sumber daya, serta menyusun berbagai kegiatan literasi yang mendukung peningkatan literasi membaca murid. Analisis difokuskan pada proses penyusunan program kerja, pengadaan koleksi perpustakaan, perencanaan kegiatan literasi, penyediaan tenaga pengelola, serta integrasi program perpustakaan ke dalam pembelajaran. Dengan demikian, fungsi perencanaan menjadi

indikator awal dalam menilai efektivitas manajemen program perpustakaan sekolah.

b) Pengorganisasian (*Organizing)*

Setelah proses perencanaan ditetapkan, fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian *(organizing)*. George R. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses mengelompokkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan pembagian tugas kepada setiap anggota organisasi, memberikan wewenang yang sesuai, serta membangun hubungan kerja yang memungkinkan seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif (George R. Terry dalam Sukarna, 2011: 38).

Pengorganisasian tidak hanya berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dimiliki, pembagian tanggung jawab, koordinasi antarpersonel, serta penetapan mekanisme kerja yang jelas. Melalui pengorganisasian yang baik, setiap anggota organisasi memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara terarah dan mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

Fungsi pengorganisasian diwujudkan melalui penyusunan struktur organisasi sekolah, pembagian tugas kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengorganisasian juga mencakup koordinasi antarpersonel agar seluruh program sekolah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Fungsi pengorganisasian pada pengelolaan program perpustakaan sekolah meliputi pembentukan struktur organisasi perpustakaan, penetapan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, guru, pengelola perpustakaan, maupun tenaga pendukung lainnya, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan literasi. Pengorganisasian yang baik

akan menciptakan koordinasi yang efektif sehingga seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mengembangkan budaya literasi.

Dalam penelitian ini, fungsi pengorganisasian digunakan untuk menganalisis bagaimana SDN Pasawahan Kidul dan SDN Cihuni membentuk struktur pengelolaan perpustakaan, membagi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru, serta pengelola perpustakaan, sekaligus membangun koordinasi dalam penyelenggaraan program literasi membaca.

c) Pelaksanaan (*Actuating)*

Pelaksanaan *(actuating)* merupakan proses menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bersedia dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, actuating merupakan usaha membangkitkan kemauan anggota organisasi agar bekerja dengan penuh semangat, bekerja sama, serta mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi (George R. Terry dalam Sukarna, 2011: 82).

Proses pelaksanaan menempati posisi yang sangat penting dalam proses manajemen karena perencanaan dan pengorganisasian tidak akan memberikan hasil apabila tidak diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut mampu memberikan arahan, motivasi, pembinaan, komunikasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar seluruh anggota organisasi memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam dunia pendidikan, fungsi pelaksanaan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta murid. Pelaksanaan program tidak hanya menekankan pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan berlangsung sesuai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

Pada pengelolaan program perpustakaan sekolah, fungsi *actuating* diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, seperti

pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, penggunaan media digital, pelaksanaan pojok baca, serta berbagai kegiatan literasi lain yang melibatkan murid secara aktif. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam membangun motivasi, kolaborasi dan partisipasi seluruh warga sekolah.

Fungsi pelaksanaan (*actuating)* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana SDN Pasawahan Kidul dan SDN Cihuni menganalisis bagaimana program perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan literasi membaca, pemanfaatan koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program.

d) Pengendalian (*Controlling)*

Fungsi terakhir dalam proses manajemen menurut George R. Terry adalah *controlling* atau pengendalian. Terry menjelaskan bahwa controlling merupakan proses menentukan standar pelaksanaan, mengukur hasil yang telah dicapai, membandingkan hasil tersebut dengan rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan (George R. Terry dalam Sukarna, 2011: 132).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, fungsi *controlling* umumnya diwujudkan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun George R. Terry menggunakan istilah *controlling*, implementasinya di lingkungan pendidikan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada penilaian terhadap ketercapaian tujuan program sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi dipahami sebagai bagian dari fungsi *controlling*, bukan sebagai fungsi manajemen yang berdiri sendiri.

Melalui fungsi *controlling*, organisasi dapat mengetahui apakah seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan

program, serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program pada masa mendatang menjadi lebih efektif. Dengan demikian, *controlling* berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dalam keseluruhan proses manajemen. Dalam konteks pengelolaan program perpustakaan sekolah, mekanisme tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring pelaksanaan program literasi, evaluasi terhadap pemanfaatan perpustakaan, penilaian perkembangan literasi membaca murid, serta penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, fungsi *controlling* digunakan untuk menganalisis proses monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program perpustakaan sekolah. Analisis tersebut diarahkan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah direncanakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta mengkaji berbagai upaya perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi membaca murid.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry, dapat dipahami bahwa POAC merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan menjadi dasar dalam menentukan arah organisasi, pengorganisasian memastikan pembagian tugas dan sumber daya berjalan secara efektif, pelaksanaan menggerakkan seluruh unsur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut berfungsi memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan rencana serta menjadi dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan.

Keempat fungsi tersebut digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini untuk menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid di sekolah dasar. Seluruh proses pengelolaan program perpustakaan dianalisis berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

sehingga mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan program perpustakaan sekolah. Dengan demikian, teori George R. Terry menjadi landasan konseptual utama dalam menganalisis proses manajemen yang terjadi pada dua sekolah yang menjadi lokasi penelitian.

3. Manajemen Program Perpustakaan Sekolah

Manajemen program perpustakaan sekolah merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan perpustakaan sebagai bagian dari sistem pendidikan di sekolah. Perpustakaan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, melainkan sebagai pusat sumber belajar yang berperan dalam mendukung proses pembelajaran, mengembangkan budaya literasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh program yang diselenggarakan oleh perpustakaan memerlukan pengelolaan yang sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut Ibrahim Bafadal (2011) dalam buku Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, pengelolaan perpustakaan sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mengatur seluruh komponen perpustakaan, mulai dari pengadaan bahan pustaka, pengolahan koleksi, pelayanan kepada pengguna, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan. Melalui pengelolaan tersebut, perpustakaan diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar serta membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan (Bafadal (2011), 2011:1-5).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan menurut Bafadal (2011) lebih menitikberatkan pada pengelolaan seluruh komponen perpustakaan secara sistematis agar mampu memberikan layanan yang optimal bagi warga sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan koleksi buku, tetapi

juga oleh bagaimana setiap komponen perpustakaan dikelola secara terencana sehingga mampu mendukung proses pembelajaran.

Berbeda dengan Bafadal (2011) yang lebih menekankan aspek pengelolaan komponen perpustakaan, Darmono memandang perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan. Menurut Darmono, perpustakaan memiliki fungsi sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai informasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, untuk memenuhi kebutuhan belajar warga sekolah (Darmono, 2004: 1–4).

Pandangan Darmono memperluas konsep pengelolaan perpustakaan dari sekadar pengelolaan koleksi menuju fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan perpustakaan tidak hanya dilihat dari tertibnya administrasi atau banyaknya koleksi, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Perkembangan konsep perpustakaan sekolah kemudian mendorong perubahan paradigma pengelolaan perpustakaan. Pandangan tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Sutarno NS, yang melihat manajemen perpustakaan sebagai proses pemanfaatan seluruh sumber daya perpustakaan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan perpustakaan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Sutarno NS, 2006: 11–17).

Berbeda dengan Bafadal (2011) yang berfokus pada pengelolaan komponen perpustakaan dan Darmono yang menekankan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, Sutarno memberikan perspektif yang lebih luas dengan menempatkan perpustakaan sebagai organisasi layanan informasi yang harus dikelola menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program perpustakaan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen perpustakaan sekolah menghadapi transformasi secara dinamis. Paradigma pengelolaan perpustakaan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan mengatur koleksi dan sarana pendukung, tetapi telah berkembang menjadi suatu sistem layanan Pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Bafadal (2011) memberikan penekanan pada pengelolaan seluruh komponen perpustakaan secara terencana, Darmono menegaskan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan Sutarno NS memperluas konsep tersebut dengan menempatkan perpustakaan sebagai organisasi layanan informasi yang dikelola melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen.

Perkembangan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perpustakaan sekolah tidak hanya bergantung pada ketersediaan koleksi maupun sarana prasarana, tetapi juga pada kemampuan pengelola dalam mengelola sumber daya, menyelenggarakan berbagai program serta menghadirkan layanan perpustakaan yang mampu mendukung proses pembelajaran dan penguatan budaya literasi di sekolah.

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, perpustakaan sekolah saat ini berkembang menjadi learning resource center yang menyediakan berbagai sumber belajar dalam bentuk cetak maupun digital. Perubahan tersebut menuntut perpustakaan untuk tidak hanya menyediakan koleksi, tetapi juga mengembangkan berbagai program literasi, layanan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan guru dalam mendukung proses pembelajaran. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam merancang dan melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan murid serta perkembangan kebijakan pendidikan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya berkaitan dengan

pengelolaan koleksi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, layanan dan berbagai program literasi yang mendukung proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, konsep tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry diimplementasikan dalam penyelenggaraan program perpustakaan sekolah sebagai upaya meningkatkan literasi membaca murid.

Dalam penelitian ini, manajemen program perpustakaan sekolah dipahami sebagai proses pengelolaan berbagai program literasi melalui penerapan fungsi planning, organizing, actuating dan controlling sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry. Oleh karena itu, konsep manajemen program perpustakaan sekolah menjadi penghubung antara teori manajemen dengan implementasi program literasi membaca yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Literasi Membaca

Literasi membaca merupakan salah satu kompetensi dasar yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Kemampuan membaca tidak hanya berkaitan dengan kecakapan mengenali huruf atau melafalkan kata-kata, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, literasi membaca menjadi fondasi bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, serta pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, penguatan literasi membaca menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada awal perkembangannya, konsep literasi dipahami secara sederhana sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis (*reading and writing*). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, makna literasi mengalami perluasan. Literasi tidak lagi dimaknai hanya sebagai kemampuan mekanis dalam membaca teks, tetapi berkembang menjadi

kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, menggunakan informasi secara tepat, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan konsep tersebut menunjukkan bahwa literasi merupakan seperangkat kompetensi yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan teknologi.

Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasikan, serta menggunakan informasi melalui berbagai bentuk kegiatan membaca, menulis dan berinteraksi dengan berbagai media. Literasi dipandang sebagai kemampuan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, mencapai tujuan hidupnya, serta terus mengembangkan pengetahuan dan potensinya sepanjang hayat. (UNESCO, 2004:13).

OECD (2019: 28) mendefinisikan *reading literacy* sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan dan melibatkan diri dengan berbagai jenis teks untuk mencapai tujuan tertentu, mengembangkan pengetahuan, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa literasi membaca tidak lagi dipahami sebagai kemampuan membaca secara mekanis, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa literasi membaca memiliki dimensi yang lebih luas karena menuntut pembaca mampu menggunakan hasil bacaannya dalam berbagai situasi kehidupan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Yunus Abidin yang menjelaskan bahwa literasi membaca merupakan kemampuan memahami makna yang terkandung dalam suatu teks melalui proses berpikir, menganalisis informasi, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah dimiliki, serta menggunakan hasil pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran literasi membaca tidak cukup hanya melatih kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi agar

murid mampu menginterpretasikan, mengevaluasi, serta menghasilkan makna dari berbagai sumber bacaan. (Yunus Abidin, 2012:4-9).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penguatan literasi membaca menjadi salah satu prioritas nasional yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Gerakan ini bertujuan membangun budaya membaca melalui pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung implementasi Gerakan Literasi Sekolah karena menyediakan berbagai sumber bacaan, ruang belajar, serta program-program literasi yang memungkinkan murid membangun kebiasaan membaca secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan penguatan literasi membaca di sekolah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan program perpustakaan sekolah.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa literasi membaca merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Literasi membaca tidak hanya dipandang sebagai kemampuan akademik, tetapi juga sebagai kompetensi dasar yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat serta pembentukan masyarakat yang berpengetahuan.

Dalam penelitian ini, literasi membaca dipahami sebagai kemampuan murid sekolah dasar dalam membangun kebiasaan membaca, memahami isi bacaan, menginterpretasikan informasi, serta memanfaatkan hasil bacaan sebagai bagian dari proses belajar. Peningkatan literasi membaca tersebut dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan manajemen program perpustakaan sekolah sehingga konsep literasi membaca menjadi landasan Teoretis dalam menganalisis

efektivitas program perpustakaan yang dilaksanakan di SDN Pasawahan Kidul dan SDN Cihuni.

5. Minat Baca

Minat baca merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan seseorang dalam mengembangkan kemampuan literasi membaca. Murid yang memiliki minat baca tinggi cenderung lebih sering berinteraksi dengan berbagai bahan bacaan sehingga memperoleh pengalaman membaca yang lebih banyak dibandingkan murid yang memiliki minat baca rendah. Kebiasaan tersebut secara bertahap akan memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, minat baca dipandang sebagai salah satu prasyarat penting dalam membangun budaya literasi di sekolah.

Minat baca merupakan kecenderungan individu untuk melakukan aktivitas membaca secara sukarela karena adanya rasa senang, kebutuhan, maupun dorongan dari dalam diri (Harris dan Sipay,1980: 257). Menurut mereka, minat membaca tidak muncul secara spontan, tetapi berkembang melalui pengalaman yang menyenangkan ketika seseorang berinteraksi dengan bahan bacaan serta lingkungan yang mendukung kegiatan membaca. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan minat baca tidak hanya bergantung pada kemampuan membaca, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang dialami murid. Semakin sering murid memperoleh pengalaman membaca yang positif, semakin besar kemungkinan tumbuhnya kebiasaan membaca secara berkelanjutan. Sebaliknya, pengalaman membaca yang kurang menyenangkan dapat mengurangi motivasi murid untuk kembali melakukan aktivitas membaca.

Menurut Harris dan Sipay (1980: 257–260), berkembangnya minat membaca dipengaruhi oleh beberapa reading triggers, yaitu faktor-faktor yang mampu mendorong seseorang untuk mulai membaca maupun mempertahankan kebiasaan membaca. Faktor-faktor tersebut meliputi *situational triggers, maintenance triggers, emerging individual interest dan*

well-developed individual interest. Keempat faktor tersebut menggambarkan bahwa minat membaca berkembang secara bertahap melalui interaksi antara pengalaman individu dengan lingkungan belajar yang mendukung.

Situational triggers merupakan rangsangan awal yang berasal dari lingkungan dan mampu menarik perhatian murid terhadap aktivitas membaca. Rangsangan tersebut dapat berupa tersedianya buku-buku yang menarik, kegiatan mendongeng, pojok baca, perpustakaan yang nyaman, maupun berbagai program literasi yang diselenggarakan sekolah. Pada tahap ini, ketertarikan murid masih dipengaruhi oleh faktor eksternal sehingga keberadaan lingkungan belajar menjadi sangat penting dalam membangun minat membaca.

Selanjutnya ada *Maintenance Triggers* yang berperan mempertahankan ketertarikan murid agar kebiasaan membaca terus berkembang. Harris dan Sipay (1980: 258–259) menjelaskan bahwa keberlanjutan minat membaca memerlukan pengalaman membaca yang menyenangkan secara berulang, dukungan guru dan keluarga, serta tersedianya berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Dengan demikian, pembentukan budaya membaca tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi memerlukan program yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tahap berikutnya adalah *emerging individual interest*, yaitu kondisi ketika minat membaca mulai tumbuh dari dalam diri murid. Pada tahap ini, ketertarikan terhadap aktivitas membaca tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan, tetapi mulai berkembang menjadi ketertarikan pribadi terhadap topik atau jenis bacaan tertentu. Murid mulai memilih bahan bacaan sesuai dengan minatnya, aktif mencari informasi yang ingin diketahui, serta melakukan kegiatan membaca bukan semata-mata karena tuntutan guru atau orang tua, melainkan karena munculnya rasa ingin tahu yang berasal dari dalam dirinya sendiri (Harris & Sipay, 1980: 259–260).

Apabila pengalaman membaca yang positif berlangsung secara terus-menerus, maka minat membaca akan berkembang menjadi *well-developed individual interest*. Pada tahap ini, membaca telah menjadi kebutuhan sekaligus kebiasaan yang melekat dalam diri murid. Murid memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk membaca, mampu memilih berbagai sumber bacaan secara mandiri, serta menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat membaca telah berkembang secara optimal sehingga tidak lagi bergantung pada dorongan dari lingkungan, tetapi tumbuh sebagai kesadaran dan kebutuhan pribadi (Harris & Sipay, 1980: 260–261).

Berdasarkan teori Harris dan Sipay, dapat dipahami bahwa minat membaca merupakan proses yang berkembang secara bertahap melalui interaksi antara faktor individu dengan lingkungan yang mendukung. Minat membaca tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui pengalaman membaca yang menyenangkan, dukungan lingkungan, serta penyediaan berbagai stimulus yang mampu menumbuhkan dan mempertahankan kebiasaan membaca. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk minat membaca murid.

Pandangan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner, yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan. Lingkungan sekolah, guru, perpustakaan, keluarga, serta berbagai program literasi yang diselenggarakan sekolah merupakan bagian dari sistem lingkungan yang dapat menjadi *situational triggers* maupun *maintenance triggers* dalam membangun minat membaca murid. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan minat baca tidak hanya bergantung pada karakteristik individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang dikelola secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, teori Harris dan Sipay digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen program perpustakaan sekolah mampu menumbuhkan dan mempertahankan minat membaca murid melalui penyediaan lingkungan literasi yang kondusif, pengembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan murid, pelaksanaan program pembiasaan membaca, serta kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan pengelola perpustakaan. Dengan demikian, teori ini melengkapi Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner sebagai *grand theory* dan Teori Manajemen George R. Terry sebagai *middle theory*, sehingga memberikan landasan konseptual dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan program perpustakaan sekolah dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi membaca murid.

6. Tahapan Perkembangan Kemampuan Membaca (Linnea C. Ehri)

Kemampuan membaca tidak berkembang secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan perkembangan kognitif, bahasa, serta pengalaman belajar yang diperoleh murid. Setiap murid memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, namun secara umum perkembangan kemampuan membaca menunjukkan pola yang relatif sama, dimulai dari kemampuan mengenali simbol-simbol sederhana hingga mampu memahami dan menginterpretasikan makna suatu bacaan secara mendalam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tahapan perkembangan membaca menjadi penting sebagai dasar dalam merancang pembelajaran maupun program literasi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan murid sekolah dasar.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perkembangan kemampuan membaca dikemukakan oleh Linnea C. Ehri. Dalam artikelnya yang berjudul "*Phases of Development in Learning to Read Words by Sight*", Ehri (1995: 116–125) menjelaskan bahwa perkembangan kemampuan membaca berlangsung melalui beberapa fase yang menunjukkan perubahan cara murid mengenali kata-kata, memahami hubungan antara huruf dan bunyi, hingga mampu membaca secara otomatis.

Menurut Ehri, perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kematangan usia, tetapi juga oleh pengalaman belajar membaca yang diperoleh secara berkelanjutan.

Pandangan Ehri menunjukkan bahwa kemampuan membaca berkembang melalui proses pembentukan hubungan antara bentuk tulisan, bunyi bahasa dan makna kata yang tersimpan di dalam memori. Proses tersebut dikenal sebagai *orthographic mapping*, yaitu mekanisme ketika individu secara bertahap mampu menghubungkan huruf, bunyi dan makna sehingga kata-kata dapat dikenali secara otomatis tanpa harus dieja kembali setiap kali membaca. Menurut Ehri (1995: 116–121), semakin sering murid berinteraksi dengan berbagai bacaan, semakin kuat hubungan tersebut terbentuk sehingga kemampuan membaca berkembang dari proses mengenali huruf menuju pemahaman bacaan secara lancar dan bermakna.

Berdasarkan proses perkembangan tersebut, Ehri membagi perkembangan kemampuan membaca ke dalam empat fase yang berlangsung secara bertahap, yaitu *pre-alphabetic phase, partial alphabetic phase, full alphabetic phase dan consolidated alphabetic phase.*

a) *Pre-alphabetic Phase*

Pada tahap *pre-alphabetic phase*, murid belum memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Pengenalan kata masih didasarkan pada ciri-ciri visual, seperti bentuk gambar, warna, atau logo yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut **Ehri (1995: 122),** pada fase ini murid lebih mengandalkan ciri visual dibandingkan kemampuan menghubungkan huruf dengan bunyi sehingga kemampuan membaca masih sangat terbatas dan belum menunjukkan pemahaman terhadap sistem alfabet.

Dalam konteks penelitian ini, murid yang masih berada pada tahap *pre-alphabetic* memerlukan pengalaman awal yang menyenangkan dalam berinteraksi dengan bahan bacaan sehingga tumbuh ketertarikan terhadap aktivitas membaca sejak dini. Program perpustakaan sekolah seperti kegiatan mendongeng, pembacaan nyaring (*read aloud*), penggunaan buku

bergambar, serta penyediaan pojok baca menjadi bentuk layanan yang dapat membantu murid mengenal buku dan menumbuhkan ketertarikan awal terhadap kegiatan membaca.

b) *Partial Alphabetic Phase*

Tahap berikutnya adalah *partial alphabetic phase*, yaitu fase ketika murid mulai mengenali sebagian hubungan antara huruf dan bunyi. Pada tahap ini murid mulai menggunakan beberapa huruf, terutama huruf awal dan akhir suatu kata, sebagai petunjuk dalam membaca. Ehri (1995: 122–123) menjelaskan bahwa kemampuan tersebut masih bersifat terbatas sehingga murid sering mengalami kesalahan ketika mengenali kata-kata yang memiliki bentuk atau bunyi yang hampir sama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa murid memerlukan kesempatan membaca yang lebih beragam agar kemampuan mengenali huruf dan bunyi berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, pengelolaan perpustakaan sekolah perlu menyediakan koleksi bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan membaca murid, seperti buku bacaan awal, buku berilustrasi, maupun bahan bacaan dengan kalimat sederhana.

Selain menyediakan koleksi yang sesuai, guru dan pengelola perpustakaan juga perlu memberikan pendampingan membaca secara bertahap agar murid memperoleh pengalaman membaca yang berulang dan bermakna.

c) *Full Alphabetic Phase*

Pada tahap *full alphabetic phase*, murid telah mampu memahami hubungan antara seluruh huruf dan bunyi dalam suatu kata. Kemampuan tersebut memungkinkan murid melakukan proses *decoding* secara lebih akurat sehingga dapat membaca kata-kata baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. **Menurut Ehri (1995: 123–124),** pada fase ini murid mulai memahami pola ejaan secara lebih baik sehingga proses membaca menjadi semakin lancar dan akurat.

Pada fase ini, perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman membaca murid melalui penyediaan koleksi yang

semakin beragam. Melalui koleksi cerita anak, buku pengetahuan populer, majalah anak, maupun kegiatan membaca terpandu, perpustakaan dapat membantu murid memperluas kosakata, meningkatkan kelancaran membaca, serta memperkaya pengalaman belajar melalui kegiatan literasi yang berkesinambungan.

d) *Consolidated Alphabetic Phase*

Tahap terakhir adalah *consolidated alphabetic phase*, yaitu fase ketika murid telah mampu mengenali kelompok huruf, pola suku kata, awalan, akhiran, maupun morfem secara otomatis. Pada tahap ini membaca tidak lagi berfokus pada pengenalan huruf satu per satu, tetapi telah berkembang menjadi proses memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Ehri (1995: 124–125) menjelaskan bahwa kemampuan tersebut memungkinkan murid memusatkan perhatian pada pemahaman makna bacaan karena proses pengenalan kata telah berlangsung secara otomatis.

Dalam penelitian ini, murid yang telah mencapai tahap *consolidated alphabetic* memerlukan program literasi yang lebih menantang. Pengelolaan program perpustakaan sekolah dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui kegiatan resensi buku, bedah buku, diskusi bacaan, proyek literasi, maupun pemanfaatan koleksi digital.

Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif dan analitis, sehingga murid tidak hanya mampu memahami isi bacaan, tetapi juga mampu menghubungkan informasi, menyampaikan kembali gagasan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ehri (1995), kemampuan membaca berkembang melalui tahapan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap fase menunjukkan peningkatan kemampuan murid dalam mengenali huruf, memahami hubungan antara huruf dan bunyi, hingga mampu membaca secara otomatis serta memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh

kesiapan individu, tetapi juga oleh pengalaman belajar yang diperoleh melalui lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan membaca murid serta pelaksanaan program literasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam membantu murid mencapai kemampuan membaca yang optimal.

Dalam penelitian ini, teori Ehri digunakan untuk menjelaskan bahwa peningkatan literasi membaca murid memerlukan program yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan kemampuan membaca. Oleh karena itu, manajemen program perpustakaan sekolah diharapkan mampu menyediakan berbagai layanan, koleksi, serta kegiatan literasi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan membaca murid sehingga mampu mendukung peningkatan literasi membaca secara bertahap dan berkelanjutan.

7. Teori *New Literacies* (Donald J. Leu)

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara individu memperoleh, mengelola dan menggunakan informasi. Aktivitas membaca tidak lagi terbatas pada teks cetak, tetapi juga mencakup berbagai bentuk informasi digital yang disajikan melalui internet, media sosial, buku elektronik, maupun berbagai platform pembelajaran digital. Perubahan tersebut menyebabkan konsep literasi berkembang dari sekadar kemampuan membaca dan menulis menuju kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi dalam berbagai media.

Perubahan paradigma tersebut melahirkan konsep *New Literacies*, yaitu seperangkat kemampuan yang diperlukan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, mengolah, serta mengomunikasikan informasi melalui berbagai media digital. Menurut Leu et al. (2013: 1150–1154), perkembangan teknologi informasi telah mengubah hakikat literasi sehingga kemampuan membaca pada abad ke-21 tidak lagi terbatas pada memahami teks cetak, tetapi juga mencakup kemampuan menelusuri informasi secara daring (*online inquiry*), mengevaluasi kredibilitas berbagai

sumber informasi, mengintegrasikan informasi dari berbagai media, serta mengomunikasikan kembali informasi tersebut secara efektif melalui teknologi digital.

Salah satu karakteristik utama *New Literacies* adalah sifatnya yang deiktik (*deictic*), yaitu terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Leu dkk. (2013: 1151–1153), kemampuan literasi yang dibutuhkan pada suatu masa dapat berubah seiring dengan munculnya teknologi baru. Oleh karena itu, literasi tidak lagi dipahami sebagai seperangkat keterampilan yang bersifat tetap, tetapi sebagai kompetensi yang terus berkembang sesuai dengan dinamika teknologi informasi.

Konsep *New Literacies* menunjukkan bahwa kemampuan membaca pada era digital tidak hanya berkaitan dengan aktivitas memahami isi bacaan, tetapi juga mencakup kemampuan menentukan kebutuhan informasi, mencari informasi dari berbagai sumber, menyeleksi informasi yang relevan, mengevaluasi keakuratan dan kredibilitas sumber, mengintegrasikan berbagai informasi, serta menggunakan informasi tersebut secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran literasi tidak cukup hanya membiasakan murid membaca buku cetak, tetapi juga perlu memberikan pengalaman dalam memanfaatkan berbagai sumber informasi secara kritis, selektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, konsep *New Literacies* memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital. Kemampuan tersebut juga sejalan dengan arah transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan pendekatan *Deep Learning* yang menekankan pembelajaran bermakna, kemampuan bernalar, serta pemanfaatan berbagai sumber belajar untuk membangun pengetahuan secara mandiri. Oleh karena itu, pengembangan literasi di sekolah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan membaca, tetapi juga

pada kemampuan murid dalam menggunakan informasi secara bijaksana di era digital.

Perkembangan konsep *New Literacies* membawa implikasi terhadap perubahan fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi buku cetak, tetapi berkembang menjadi pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai sumber informasi dalam bentuk cetak maupun digital. Oleh karena itu, pengelolaan program perpustakaan sekolah perlu mampu memfasilitasi murid dalam mengembangkan keterampilan mencari, memilih, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi melalui berbagai media sebagai bagian dari penguatan literasi membaca pada abad ke-21.

Dalam penelitian ini, Teori New Literacies yang dikemukakan oleh Donald J. Leu digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen program perpustakaan sekolah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi melalui penyediaan sumber belajar digital, pemanfaatan media teknologi, serta penyelenggaraan berbagai program literasi yang mendukung pengembangan kemampuan membaca, literasi informasi dan literasi digital murid. Dengan demikian, perpustakaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan bacaan, tetapi juga sebagai lingkungan belajar yang mampu membekali murid dengan kompetensi literasi yang relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian aspek akademik, tetapi juga berlandaskan pada sistem nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap proses pendidikan mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan, termasuk manajemen program perpustakaan sekolah, tidak hanya memerlukan landasan Teoretis dan kebijakan, tetapi

juga memerlukan landasan nilai agar seluruh proses yang dilaksanakan tetap berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan.

Dalam perspektif pendidikan Indonesia, Achmad Sanusi mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu didasarkan pada **Enam Sistem Nilai,** yaitu nilai teologis, nilai etis-hukum, nilai estetis, nilai logis-rasional, nilai fisik-fisiologis dan nilai teleologis. Keenam sistem nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk proses pendidikan yang utuh, sehingga setiap kebijakan maupun program pendidikan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga aspek moral, kemanusiaan, rasionalitas, keindahan, kesehatan, serta kebermanfaatannya bagi peserta didik dan masyarakat. Konsep ini juga menjadi salah satu landasan dalam pengembangan manajemen pendidikan di lingkungan Universitas Islam Nusantara (UNINUS).

Dalam penelitian ini, Enam Sistem Nilai diposisikan sebagai **landasan filosofis** yang memberikan arah terhadap pengelolaan program perpustakaan sekolah. Nilai-nilai tersebut tidak digunakan sebagai teori analisis, melainkan sebagai dasar filosofis yang melandasi penyelenggaraan manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid. Adapun keenam sistem nilai tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai Teologis

Nilai teologis merupakan nilai yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan nasional maupun pendidikan Islam, seluruh proses pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.

Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan program pendidikan, termasuk pengelolaan perpustakaan sekolah, hendaknya dilaksanakan

sebagai bagian dari ikhtiar dalam menumbuhkan budaya belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Konsep tersebut sejalan dengan Enam Sistem Nilai yang dikemukakan oleh Achmad Sanusi, yang menempatkan nilai teologis sebagai landasan filosofis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Landasan teologis mengenai pentingnya membaca dan menuntut ilmu tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Swt. dalam **Q.S. Al-'Alaq ayat 1–5:**

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝٣ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Latin: *Iqra' bismi rabbika alladzī khalaq. Khalaqal-insāna min 'alaq. Iqra' wa rabbukal-akram. Alladzī 'allama bil-qalam. 'Allamal-insāna mā lam ya'lam.*

Artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas membaca merupakan perintah pertama dalam Islam sekaligus menjadi pintu masuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Perintah *iqra'* tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan membaca teks, tetapi juga sebagai ajakan untuk mempelajari, memahami, serta mengembangkan berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, budaya membaca menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan, karena melalui membaca manusia memperoleh pengetahuan, membangun cara berpikir, serta meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan dasar, nilai teologis menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan berbagai program literasi di sekolah. Perpustakaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran yang mendukung tumbuhnya budaya membaca, semangat mencari ilmu, serta pembentukan karakter murid yang gemar belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pengelolaan program perpustakaan sekolah hendaknya dilaksanakan secara profesional sekaligus dilandasi oleh kesadaran bahwa menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan merupakan bagian dari tanggung jawab pendidikan dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia.

Dalam penelitian ini, nilai teologis dipahami sebagai landasan filosofis yang memberikan arah bahwa manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan pencapaian indikator kinerja, tetapi juga merupakan upaya untuk menumbuhkan budaya membaca sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.

2. Nilai Etis-Hukum

Nilai etis-hukum merupakan nilai yang mengarahkan setiap penyelenggaraan pendidikan agar dilaksanakan berdasarkan norma moral, etika, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif Enam Sistem Nilai yang dikemukakan oleh Achmad Sanusi, nilai etis-hukum menempatkan pendidikan sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan akademik, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, setiap program pendidikan perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ ۞
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Latin:

Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl, innallāha ni'immā ya'iẓukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā.

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisā': 58).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya amanah, keadilan, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban. Dalam konteks pendidikan, nilai tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan perpustakaan sekolah perlu dilaksanakan berdas arkan prinsip etika, kejujuran dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku sehingga mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga sekolah.

Dalam konteks pendidikan nasional, nilai etis-hukum tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta berbagai kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan penguatan budaya literasi. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu, termasuk pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah, nilai etis-hukum diwujudkan melalui pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, serta memberikan pelayanan yang adil

kepada seluruh warga sekolah tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan peserta didik. Pengelolaan koleksi, pelayanan peminjaman, penyelenggaraan program literasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan, prinsip akuntabilitas, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat sumber belajar, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, nilai etis-hukum menjadi landasan filosofis bahwa manajemen program perpustakaan sekolah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan. Seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program perpustakaan diharapkan mampu mencerminkan tata kelola yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan literasi membaca murid.

3. Nilai Estetis

Nilai estetis merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, kenyamanan, keharmonisan, serta keteraturan yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam perspektif Enam Sistem Nilai yang dikemukakan oleh Achmad Sanusi, nilai estetis menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pendidikan karena lingkungan belajar yang tertata dengan baik dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna serta mendorong tumbuhnya motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan perlu menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan menarik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah, nilai estetis diwujudkan melalui pengelolaan ruang perpustakaan yang nyaman, tertata rapi, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, serta didukung oleh

penataan koleksi yang memudahkan murid dalam menemukan bahan bacaan. Selain itu, keberadaan pojok baca, media informasi yang menarik, dekorasi edukatif, serta lingkungan membaca yang kondusif merupakan bagian dari upaya menciptakan pengalaman literasi yang menyenangkan. Lingkungan perpustakaan yang memiliki nilai estetis diharapkan mampu meningkatkan minat murid untuk berkunjung, membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.

Nilai estetis dalam penelitian ini menjadi landasan filosofis bahwa pengelolaan program perpustakaan sekolah tidak hanya berorientasi pada kelengkapan koleksi maupun administrasi layanan, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan bagi murid. Dengan demikian, suasana perpustakaan yang tertata dengan baik diharapkan dapat mendukung terbentuknya budaya literasi membaca secara berkelanjutan.

4. Nilai Logis Rasional

Nilai logis-rasional merupakan nilai yang menekankan pentingnya penggunaan akal pikir, penalaran, serta pertimbangan ilmiah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Enam Sistem Nilai, penyelenggaraan pendidikan hendaknya didasarkan pada cara berpikir yang objektif, sistematis, kritis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap kebijakan maupun program yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pencapaian tujuan pendidikan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 190–191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Latin:

Inna fī khalqis-samāwāti wal-arḍi wakhtilāfil-laili wan-nahāri laāyātil li'ulil-albāb.

Artinya:

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal." (Q.S. Āli 'Imrān: 190).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk menggunakan akal, berpikir secara logis, serta melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena sebagai dasar memperoleh pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, nilai logis-rasional menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, fakta, serta pertimbangan ilmiah sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan peserta didik.

Dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, nilai logis-rasional diwujudkan melalui penyusunan program perpustakaan berdasarkan analisis kebutuhan, pengelolaan koleksi sesuai karakteristik murid, pemanfaatan data kunjungan perpustakaan, serta evaluasi terhadap efektivitas berbagai program literasi yang telah dilaksanakan. Pengambilan keputusan tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan, tetapi menggunakan berbagai informasi dan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan.

Dalam penelitian ini, nilai logis-rasional menjadi landasan filosofis bahwa manajemen program perpustakaan sekolah perlu dilaksanakan secara sistematis, objektif, serta berbasis data. Seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat sehingga program perpustakaan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan literasi membaca murid.

5. Nilai Fisik-Fisiologis

Nilai fisik-fisiologis merupakan nilai yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia sebagai pendukung berlangsungnya proses pendidikan secara optimal. Dalam perspektif Enam Sistem Nilai, penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan kondisi lingkungan, kesehatan, keamanan, serta kenyamanan peserta didik agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Latin:

Wa lā tulqū bi'aidīkum ilat-tahlukah.

Artinya:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Q.S. Al-Baqarah: 195).

Ayat tersebut memberikan pesan mengenai pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan dan kualitas kehidupan manusia. Dalam penyelenggaraan pendidikan, nilai tersebut diwujudkan melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, sehat dan nyaman sehingga mampu mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang layak menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung budaya literasi.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah, nilai fisik-fisiologis diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang aman, bersih, nyaman, serta ramah bagi seluruh murid. Ruang baca yang memiliki pencahayaan yang memadai, ventilasi udara yang baik, meja dan kursi yang ergonomis, koleksi yang tertata rapi, serta akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar merupakan faktor yang mendukung kenyamanan murid dalam melakukan aktivitas membaca. Kondisi lingkungan fisik yang baik diharapkan mampu meningkatkan intensitas kunjungan murid ke perpustakaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, nilai fisik-fisiologis menjadi landasan filosofis bahwa keberhasilan manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang diselenggarakan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung kenyamanan murid dalam memanfaatkan layanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.

6. Nilai Teologis

Nilai teleologis merupakan nilai yang menekankan bahwa setiap kegiatan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas serta memberikan manfaat bagi perkembangan peserta didik maupun masyarakat. Dalam perspektif Enam Sistem Nilai, seluruh proses pendidikan perlu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sehingga setiap kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilaksanakan memiliki orientasi yang jelas serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Adz-Dzāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Latin:

Wa mā khalaqtul-jinna wal-insa illā liya'budūn.

Artinya:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzāriyāt: 56).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas manusia hendaknya memiliki tujuan yang jelas serta bernilai ibadah dan kemaslahatan. Dalam konteks pendidikan, seluruh program yang diselenggarakan perlu diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program perpustakaan sekolah harus dirancang secara terarah agar mampu mendukung peningkatan literasi membaca murid sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, nilai teleologis tercermin pada penyusunan berbagai program yang diarahkan untuk mendukung peningkatan literasi membaca murid, memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter gemar membaca. Seluruh program perpustakaan, mulai dari penyediaan koleksi, layanan perpustakaan, kegiatan literasi, hingga pemanfaatan

teknologi digital, perlu dirancang secara terarah agar mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Dalam penelitian ini, nilai teleologis menjadi landasan filosofis bahwa manajemen program perpustakaan sekolah harus berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan, yaitu meningkatnya literasi membaca murid melalui penyelenggaraan program perpustakaan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap fungsi manajemen yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada proses administrasi, tetapi juga diarahkan pada tercapainya hasil yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan murid.

Berdasarkan uraian mengenai Enam Sistem Nilai tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya berlandaskan pada teori manajemen dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan.

Nilai teologis memberikan arah spiritual dalam menumbuhkan budaya membaca sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan; nilai etis-hukum menekankan pentingnya profesionalisme, kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi; nilai estetis mendorong terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan menarik; nilai logis-rasional mengarahkan pengelolaan program berdasarkan pertimbangan ilmiah dan kebutuhan nyata, nilai fisik-fisiologis menekankan pentingnya sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar, sedangkan nilai teleologis memastikan bahwa seluruh program perpustakaan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, Enam Sistem Nilai menjadi landasan filosofis yang memperkuat penyelenggaraan manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid.

C. Landasan Kebijakan

Penyelenggaraan program perpustakaan sekolah tidak hanya didasarkan pada konsep dan teori yang berkembang dalam bidang manajemen pendidikan, tetapi juga berpedoman pada berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan program perpustakaan sekolah harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan serta penguatan budaya literasi di sekolah.

1. Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3).

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan yang mendukung proses belajar sepanjang hayat. Salah satu kemampuan dasar yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah kemampuan literasi membaca. Melalui kegiatan membaca, murid memperoleh informasi, memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir, serta membangun karakter belajar yang menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan budaya literasi juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan

mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi seluruh warga negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 ayat (5)). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembiasaan literasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, termasuk di sekolah dasar.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan budaya literasi di sekolah diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung proses pembelajaran, salah satunya melalui penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai bahan bacaan dan mendukung pelaksanaan program literasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan program perpustakaan sekolah menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam mewujudkan budaya membaca di lingkungan sekolah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan program perpustakaan sekolah merupakan bagian dari implementasi kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam mewujudkan tujuan pendidikan serta mengembangkan budaya literasi di sekolah. Dengan demikian, manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan satuan pendidikan, tetapi juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Pasal 23 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap sekolah atau madrasah wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan layanan perpustakaan bagi murid, pendidik dan tenaga kependidikan

(Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan dan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah menetapkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan menjadi acuan bagi penyelenggara dan pengelola perpustakaan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Standar tersebut meliputi standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan perpustakaan (Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, Pasal 2 dan Pasal 4). Selain keenam standar tersebut, peraturan ini juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas perpustakaan, peningkatan tingkat kegemaran membaca, serta penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan perpustakaan.

Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah tidak lagi dipandang sebatas penyediaan koleksi buku, tetapi mencakup penyelenggaraan layanan dan berbagai program yang mendukung proses pembelajaran serta penguatan budaya literasi. Oleh karena itu, pengelolaan perpustakaan sekolah perlu dilaksanakan secara profesional melalui perencanaan program, penyediaan sumber daya, pengembangan layanan, pelaksanaan kegiatan literasi, serta evaluasi yang berkelanjutan agar mampu memenuhi standar nasional sekaligus menjawab kebutuhan belajar murid.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan perpustakaan sekolah merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam penelitian ini, berbagai regulasi tersebut menjadi

landasan normatif dalam menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah. Dengan demikian, pengelolaan program perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, tetapi juga sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi membaca murid melalui penyelenggaraan perpustakaan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.

3. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan salah satu kebijakan nasional yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai upaya membangun budaya literasi di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat baca dan kemampuan literasi murid Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil asesmen nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong setiap sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan membaca serta mengembangkan kemampuan literasi murid secara berkelanjutan.

Dasar pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah diawali melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam peraturan tersebut, sekolah didorong untuk membiasakan murid membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan budaya belajar murid (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Gerakan Literasi Sekolah yang menjelaskan bahwa GLS merupakan gerakan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat dalam membangun budaya literasi di lingkungan sekolah (Kemendikbud, 2016). Melalui gerakan tersebut, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai kemampuan memperoleh,

memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi untuk mendukung proses belajar sepanjang hayat.

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan secara bertahap melalui tiga tahapan, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan bertujuan menumbuhkan minat baca melalui kegiatan membaca selama 15 menit dan penyediaan lingkungan sekolah yang kaya akan bahan bacaan. Tahap pengembangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam memahami isi bacaan melalui berbagai kegiatan literasi, seperti diskusi buku, resensi, maupun kegiatan membaca terpandu. Selanjutnya, tahap pembelajaran menempatkan kegiatan literasi sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sehingga murid mampu menggunakan kemampuan literasi untuk memahami berbagai materi pelajaran (Kemendikbud, 2016).

Dalam implementasinya, perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah. Perpustakaan berfungsi menyediakan koleksi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menyelenggarakan berbagai program literasi yang mampu menumbuhkan kebiasaan membaca. Oleh karena itu, keberhasilan GLS tidak hanya ditentukan oleh kegiatan membaca selama 15 menit, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar dan penggerak budaya literasi.

Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa Gerakan Literasi Sekolah merupakan salah satu strategi nasional dalam membangun budaya membaca di lingkungan pendidikan. Dalam penelitian ini, GLS menjadi landasan kebijakan yang memperkuat pentingnya manajemen program perpustakaan sekolah sebagai sarana untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan literasi secara terencana, sistematis dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan literasi membaca murid.

4. Kurikulum Merdeka Pendekatan Pembelajaran Mendalam *(Deep Learning)*

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini diarahkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, kebutuhan belajar, serta konteks lingkungan sekolah. Melalui pendekatan tersebut, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi, karakter, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis sebagai bekal menghadapi tantangan abad ke-21.

Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan Pendekatan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Dalam Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam: Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua, dijelaskan bahwa Pembelajaran Mendalam bukan merupakan kurikulum baru, melainkan suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas pembelajaran, khususnya kemampuan literasi membaca, numerasi, berpikir kritis, kreativitas dan pemecahan masalah murid.

Pembelajaran Mendalam didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan terciptanya proses belajar yang berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*) dan menggembirakan (*joyful*). Melalui pendekatan tersebut murid didorong untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami konsep secara mendalam, mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi, serta merefleksikan pengalaman belajar yang diperoleh. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada hafalan, melainkan pada pembentukan pemahaman yang utuh melalui aktivitas berpikir, berdiskusi, memecahkan masalah dan berkolaborasi.

Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi pendekatan tersebut memerlukan dukungan ekosistem pendidikan yang kondusif. Ekosistem tersebut meliputi praktik pedagogis yang berkualitas, lingkungan belajar yang mendukung, kemitraan pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sumber belajar. Selain itu, pendekatan ini menempatkan literasi membaca sebagai fondasi penting dalam proses pembelajaran karena kemampuan memahami informasi menjadi prasyarat bagi berkembangnya kompetensi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi murid.

Dalam konteks sekolah dasar, implementasi Kurikulum Merdeka dan Pendekatan Pembelajaran Mendalam memberikan implikasi terhadap pengelolaan perpustakaan sekolah. Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi berkembang menjadi pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Berbagai program literasi seperti pembiasaan membaca, membaca bersama, pojok baca, pemanfaatan buku digital, hingga kegiatan diskusi buku menjadi bagian dari upaya menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan karakteristik Pembelajaran Mendalam.

Dengan demikian, pengelolaan program perpustakaan sekolah memiliki posisi yang strategis dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan Pendekatan Pembelajaran Mendalam. Melalui penyediaan sumber belajar yang beragam, pengembangan budaya literasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan membaca, perpustakaan sekolah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung terwujudnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kebijakan Kurikulum Merdeka dan Pendekatan Pembelajaran Mendalam menjadi salah satu landasan kebijakan yang memperkuat pentingnya manajemen program perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid.

5. Peran Perpustakaan Sekolah dalam Implementasi Gerakan Literasi Sekolah

Keberhasilan implementasi Gerakan Literasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan lingkungan belajar yang mampu mendukung terbentuknya budaya literasi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, perpustakaan sekolah memiliki peran strategis sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai sumber bacaan serta memfasilitasi penyelenggaraan program literasi bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah.

Program literasi dapat dikembangkan melalui perpustakaan sekolah sesuai dengan tahapan Gerakan Literasi Sekolah, mulai dari tahap pembiasaan, pengembangan, hingga pembelajaran. Pada tahap pembiasaan, perpustakaan berperan menyediakan bahan bacaan yang beragam untuk mendukung kegiatan membaca selama 15 menit. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, perpustakaan dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi, seperti diskusi buku, resensi, membaca nyaring (*read aloud*), bedah buku, maupun pemanfaatan pojok baca sebagai sarana memperluas pengalaman membaca murid. Adapun pada tahap pembelajaran, perpustakaan mendukung proses pembelajaran melalui penyediaan berbagai sumber informasi yang relevan dengan materi pelajaran sehingga murid mampu mengembangkan kemampuan memahami, menganalisis dan memanfaatkan informasi secara lebih mendalam.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong perpustakaan sekolah untuk bertransformasi dalam mendukung implementasi Gerakan Literasi Sekolah. Perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan koleksi dalam bentuk cetak, tetapi juga mulai memanfaatkan berbagai sumber belajar digital, seperti buku elektronik, katalog daring, serta media pembelajaran berbasis teknologi. Transformasi tersebut memperluas akses murid terhadap

informasi sekaligus mendukung pengembangan budaya literasi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada abad ke-21.

Dengan demikian, perpustakaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi bacaan, tetapi juga sebagai penggerak utama pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. Keberhasilan berbagai program literasi di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola perpustakaan dalam merancang, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi berbagai kegiatan literasi yang melibatkan guru, murid, kepala sekolah, serta warga sekolah lainnya secara berkelanjutan. **Manajemen program perpustakaan sekolah dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan literasi membaca murid.**

6. Perpustakaan Sekolah sebagai Layanan Publik Pendidikan

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah pada satuan pendidikan negeri merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Sebagai lembaga yang berada dalam lingkungan sekolah, perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi, sumber belajar dan layanan literasi kepada seluruh warga sekolah secara adil, mudah diakses, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan perpustakaan sekolah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan internal sekolah, tetapi juga harus mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks pendidikan, sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat, termasuk melalui penyelenggaraan layanan perpustakaan sekolah.

Pelayanan publik yang berkualitas diselenggarakan berdasarkan berbagai asas, antara lain kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kemudahan, keterjangkauan dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan perpustakaan sekolah agar mampu memberikan layanan yang efektif, efisien dan berorientasi pada kebutuhan murid sebagai pengguna utama layanan perpustakaan.

Dalam praktiknya, pelayanan perpustakaan sekolah tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan koleksi bahan pustaka, tetapi juga melalui penyelenggaraan berbagai program literasi, layanan referensi, pendampingan kegiatan membaca, penyediaan ruang belajar yang nyaman, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan akses terhadap berbagai sumber belajar. Dengan demikian, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang mendukung pemenuhan hak murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Sebagai bagian dari pelayanan publik pendidikan, pengelolaan perpustakaan sekolah juga dituntut menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik agar seluruh layanan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, serta evaluasi layanan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa perpustakaan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi warga sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan perpustakaan sekolah tidak hanya diukur dari jumlah koleksi yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas layanan serta kontribusinya dalam mendukung proses pembelajaran dan peningkatan budaya literasi.

Pengelolaan perpustakaan SD Negeri dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan publik pendidikan yang penyelenggaraannya terikat pada

berbagai regulasi pemerintah. Oleh karena itu, manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan perpustakaan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada murid melalui penyediaan layanan literasi yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan program perpustakaan sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan perpustakaan sekolah didukung oleh regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, standar perpustakaan sekolah, penguatan budaya literasi melalui Gerakan Literasi Sekolah, implementasi Kurikulum Merdeka dan Pendekatan Pembelajaran Mendalam, serta prinsip-prinsip pelayanan publik di bidang pendidikan. Oleh karena itu, manajemen program perpustakaan sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan institusi sekolah, tetapi juga merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu serta mendukung peningkatan literasi membaca murid.

Sejalan dengan landasan teori dan berbagai kebijakan tersebut, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengelolaan perpustakaan sekolah maupun pelaksanaan program literasi di satuan pendidikan. Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengetahui perkembangan hasil penelitian, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian, serta menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut :

1. Apriyani, Harapan dan Houtman (2021) dalam artikel berjudul *"Manajemen Perpustakaan Sekolah Dasar"* yang diterbitkan dalam JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan (6(1), 132–139) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan manajemen perpustakaan di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah dasar yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pengorganisasian tenaga perpustakaan dan pengawasan program secara berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai manajemen perpustakaan di jenjang sekolah dasar melalui fungsi-fungsi manajemen. Perbedaannya, penelitian Apriyani dkk. dilakukan pada satu sekolah dasar tanpa mengaitkan langsung dengan peningkatan literasi membaca murid, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis manajemen program perpustakaan dalam meningkatkan literasi membaca murid melalui studi multikasus di dua sekolah dasar. (Apriyani, Harapan, & Houtman, 2021). Tautan akses: https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.4103
2. Krisdiantoro, Rangkuti dan Maryani (2022) dalam artikel berjudul *"Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Program Literasi Murid"* yang diterbitkan dalam Tadbir Muwahhid (6(1), 77–93) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji manajemen perpustakaan dalam meningkatkan program literasi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengadaan koleksi dan promosi perpustakaan, pengorganisasian personalia layanan, serta pelaksanaan layanan sirkulasi dan referensi berjalan cukup baik dalam mendukung program literasi, dengan faktor pendukung utama berupa ketersediaan dana BOS dan sumbangan koleksi buku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai fungsi-fungsi manajemen

perpustakaan dalam mendukung program literasi. Perbedaannya, penelitian Krisdiantoro dkk. dilakukan di jenjang sekolah menengah pertama dan tidak menggunakan kerangka POAC George R. Terry secara eksplisit, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah dasar melalui fungsi planning, organizing, actuating dan controlling (POAC) pada studi multikasus. (Krisdiantoro, Rangkuti, & Maryani, 2022). Tautan akses: https://ojs.unida.ac.id/JTM/article/view/5498

3. Penelitian yang dilakukan oleh Karima (2021) berjudul *Pengelolaan Perpustakaan sebagai Alternatif Penguatan Budaya Literasi di SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo* yang diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan bertujuan mendeskripsikan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya memperkuat budaya literasi di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan yang dilakukan secara terencana mampu mendukung terciptanya budaya literasi melalui penyediaan koleksi bacaan, layanan perpustakaan, serta keterlibatan warga sekolah dalam berbagai kegiatan literasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan perpustakaan sekolah dalam mendukung budaya literasi. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah berdasarkan fungsi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC) dalam meningkatkan literasi membaca murid pada studi multi kasus di dua sekolah dasar. Tautan akses: https://doi.org/10.26740/jdmp.v6n1.p85-96
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya, Salma, Jannah dan Prihantini (2022) berjudul *Pengelolaan Perpustakaan dalam Mengembangkan Minat Baca Murid Sekolah Dasar* yang diterbitkan dalam Aulad: Journal on Early Childhood bertujuan mendeskripsikan pengelolaan perpustakaan dalam mengembangkan minat baca murid sekolah dasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan yang baik, didukung oleh koleksi bacaan yang memadai, layanan yang optimal, serta keterlibatan guru, mampu meningkatkan minat baca murid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan perpustakaan sebagai upaya meningkatkan budaya membaca di sekolah dasar. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengelolaan perpustakaan, tetapi menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah melalui fungsi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC) dalam meningkatkan literasi membaca murid. Tautan akses: https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.161

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Pratiwi, Isnaini, Mareza dan Sulimah (2024) berjudul *Optimization of Library Service Management in Increasing Students' Reading Interest: Case Study at MI Muhammadiyah Paremono* yang diterbitkan dalam Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar bertujuan menganalisis optimalisasi manajemen layanan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca murid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi layanan perpustakaan melalui pengelolaan koleksi, pelayanan yang efektif, serta dukungan program literasi mampu meningkatkan minat baca murid secara positif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan budaya membaca. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada manajemen program perpustakaan sekolah melalui fungsi manajemen George R. Terry (POAC) dalam meningkatkan literasi membaca murid pada dua sekolah dasar negeri dengan karakteristik yang berbeda. Tautan akses: https://doi.org/10.30595/dinamika.v16i2.24086

6. Rokfah dan Diana (2024) dalam artikel berjudul *"Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Membaca Murid pada Asesmen Kompetensi Minimum"* yang diterbitkan dalam Jurnal Educatio FKIP UNMA (10(3), 833–841) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kontribusi manajemen perpustakaan terhadap kesiapan murid menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan yang terstruktur berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi membaca murid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi membaca. Perbedaannya, penelitian Rokfah dan Diana berfokus pada kaitannya dengan kesiapan asesmen kompetensi minimum pada satu sekolah, sedangkan penelitian ini menganalisis manajemen program perpustakaan melalui fungsi POAC secara multikasus di dua sekolah dasar. (Rokfah & Diana, 2024). Tautan akses: https://doi.org/10.31949/educatio.v10i3.9179
7. Afrilia dan Sulaeman (2024) dalam artikel berjudul *"Kontribusi Perpustakaan Sekolah terhadap Peningkatan Literasi Membaca Murid Kelas IV Sekolah Dasar"* yang diterbitkan dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (12(2), 339–354) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kontribusi keberadaan perpustakaan terhadap literasi membaca murid kelas IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas kunjungan dan pemanfaatan perpustakaan berkorelasi positif dengan peningkatan literasi membaca murid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai peran perpustakaan sekolah dalam mendukung literasi membaca murid sekolah dasar. Perbedaannya, penelitian Afrilia dan Sulaeman terbatas pada satu jenjang kelas dan belum menyentuh fungsi manajemen secara komprehensif, sedangkan penelitian ini menganalisis manajemen program perpustakaan melalui fungsi POAC pada studi multikasus. (Afrilia & Sulaeman, 2024).

Tautan akses: https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/view/34893

8. Hidayah, Widodo dan Hasanah (2024) dalam artikel berjudul *"Optimalisasi Pelaksanaan Layanan Perpustakaan untuk Meningkatkan Literasi Murid"* yang diterbitkan dalam Academy of Education Journal (15(2), 1504–1514) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan untuk mengkaji optimalisasi layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan lingkungan belajar yang nyaman dan program literasi yang variatif mampu meningkatkan minat dan kemampuan literasi murid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai optimalisasi layanan perpustakaan dalam mendukung literasi. Perbedaannya, penelitian Hidayah dkk. dilakukan di jenjang sekolah menengah pertama, sedangkan penelitian ini berfokus pada murid sekolah dasar dan menempatkan aspek layanan sebagai salah satu bagian dari fungsi actuating dalam kerangka manajemen POAC yang lebih menyeluruh. (Hidayah, Widodo, & Hasanah, 2024). Tautan akses: https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2512
9. Alpian dan Ruwaida (2022) dalam artikel berjudul *"Pengoptimalan Peran Perpustakaan Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Murid di Sekolah Dasar"* yang diterbitkan dalam Jurnal Basicedu (6(2), 1610–1617) menggunakan pendekatan kualitatif naratif untuk mengkaji pengoptimalan peran perpustakaan mini dalam menumbuhkan minat baca murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa keterbatasan koleksi buku, ruang yang belum memadai, serta dekorasi perpustakaan yang belum diperbarui. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai optimalisasi peran perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca. Perbedaannya, penelitian Alpian dan Ruwaida menggunakan kerangka berpikir yang sederhana dan berlokasi di satu sekolah,

sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka fungsi manajemen POAC secara multikasus di dua sekolah dasar. (Alpian & Ruwaida, 2022). Tautan akses: https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2363

10. Rahma dan Murtadlo (2023) dalam artikel berjudul *"Manajemen Literasi Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Peserta Didik di SD Muhammadiyah 11 Surabaya"* yang diterbitkan dalam Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan (11(4), 938–957) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji manajemen literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan program literasi yang baik mampu menumbuhkan minat baca murid secara signifikan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fungsi manajemen dalam mengkaji program literasi di sekolah dasar. Perbedaannya, penelitian Rahma dan Murtadlo berfokus pada manajemen literasi sekolah secara umum pada satu sekolah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji manajemen program perpustakaan pada dua sekolah dengan karakteristik berbeda. (Rahma & Murtadlo, 2023). Tautan akses: belum ditemukan link artikel langsung — cari di https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/issue/archive (Vol. 11 No. 4, 2023) atau Google Scholar.
11. Purnama, Affandi dan Nisa (2022) dalam artikel berjudul *"Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Membentuk Karakter Gemar Membaca Murid di SDN 5 Masbagik Selatan"* yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan (7(3c), 1951–1958) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam membentuk karakter gemar membaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan GLS yang konsisten mampu membentuk karakter gemar membaca murid sekolah dasar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai program literasi dalam

menumbuhkan kebiasaan membaca murid sekolah dasar. Perbedaannya, penelitian Purnama dkk. menyoroti pembentukan karakter melalui GLS secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen program perpustakaan sekolah melalui fungsi POAC. (Purnama, Affandi, & Nisa, 2022). Tautan akses: https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3c.872

12. Retnasari, Setyaningrum dan Prasetyo (2022) dalam artikel berjudul *"Culture of the School Literacy Movement (GLS) for Students in Elementary Schools to Realize the 2045 Golden Generation"* yang diterbitkan dalam Jurnal Kependidikan (8(1), 179–189) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pembudayaan Gerakan Literasi Sekolah di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembudayaan literasi yang konsisten berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pembudayaan literasi di sekolah dasar sebagai bagian dari upaya jangka panjang peningkatan kualitas pendidikan. Perbedaannya, penelitian Retnasari dkk. menyoroti pembudayaan GLS secara umum tanpa mengaitkannya dengan manajemen perpustakaan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah. (Retnasari, Setyaningrum, & Prasetyo, 2022). Tautan akses: https://doi.org/10.33394/jk.v8i1.4448
13. Puspasari dan Dafit (2021) dalam artikel berjudul *"Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar"* yang diterbitkan dalam Jurnal Basicedu (5(3), 1390–1400) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi Gerakan Literasi Sekolah di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi GLS dipengaruhi oleh dukungan kepala sekolah, ketersediaan sarana, serta keterlibatan guru dan warga sekolah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi program literasi di sekolah dasar. Perbedaannya,

penelitian Puspasari dan Dafit mengkaji implementasi GLS secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis manajemen program perpustakaan sekolah melalui fungsi POAC pada studi multikasus. (Puspasari & Dafit, 2021). Tautan akses: https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.939

14. Dermawan, Malik, Suyitno, Dewi, Solissa, Mamun dan Hita (2023) dalam artikel berjudul *"Gerakan Literasi Sekolah sebagai Solusi Peningkatan Minat Baca pada Anak Sekolah Dasar"* yang diterbitkan dalam Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi (10(1), 311–328) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peran Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan minat baca murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GLS yang dilaksanakan secara konsisten dan didukung ketersediaan bahan bacaan mampu meningkatkan minat baca murid sekolah dasar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai upaya peningkatan minat baca murid sekolah dasar. Perbedaannya, penelitian Dermawan dkk. menempatkan GLS sebagai solusi utama tanpa mengkaji fungsi manajemen perpustakaan secara spesifik, sedangkan penelitian ini menganalisis manajemen program perpustakaan melalui fungsi POAC. (Dermawan et al., 2023). Tautan akses: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i1.723
15. Kusmiati, Nurlaili, Akhmad, Warman, Mulawarman dan Azainil (2025) dalam artikel berjudul *"Manajemen Perpustakaan Berbasis Literasi Digital untuk Peningkatan Prestasi Peserta Didik di SMA Negeri Berau"* yang diterbitkan dalam Jurnal Education and Development (13(2), 367–377) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada dua sekolah untuk mengkaji manajemen perpustakaan berbasis literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keempat fungsi manajemen pendidikan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi) di kedua sekolah berjalan sesuai dengan pola Teoretis dan berdampak pada peningkatan prestasi

murid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada desain studi multikasus di dua sekolah serta penggunaan kerangka fungsi manajemen dalam mengkaji perpustakaan. Perbedaannya, penelitian Kusmiati dkk. berfokus pada literasi digital di jenjang SMA dan kaitannya dengan prestasi non-akademik seperti lomba, sedangkan penelitian ini berfokus pada literasi membaca umum murid sekolah dasar. (Kusmiati et al., 2025). Tautan akses: https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.7021

Berdasarkan kajian teori, landasan kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa manajemen program perpustakaan sekolah merupakan suatu proses pengelolaan yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian secara sistematis agar mampu mendukung peningkatan literasi membaca murid. Berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara lingkungan belajar, proses manajemen, perkembangan minat dan kemampuan membaca, serta literasi pada era digital.

Sementara itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pengembangan dalam kajian mengenai manajemen program perpustakaan sekolah yang dianalisis secara komprehensif melalui fungsi-fungsi manajemen George R. Terry pada konteks studi multi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis melalui analisis manajemen program perpustakaan sekolah serta pengembangan Model Manajemen Program Perpustakaan Berbasis Kolaborasi Literasi Integratif dalam meningkatkan literasi membaca murid.